

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

No	Wilayah	Jumlah Kasus	Jenis Dugaan Pelanggaran				Masih Proses di Bawaslu	Masih Proses di Gakkumdu	Status						Bentuk Dugaan Pelanggaran
			Pidana	Adm	Kode Etik	Lainnya			Pidana	Adm		Kode Etik	Lainnya		
										Terbukti	Tidak	Status	Terbukti	Tidak	
1	Prov. Jateng	17	1	2	3	11	-	-	1#	2	-	3&	10	1	Pidana 1. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) Administrasi 2. Pendaftaran Caleg (2 kasus) Kode Etik 3. Penyerahan BA DCS (1 kasus) 4. Penyalahgunaan kewenangan (1 kasus) 5. Netralitas Penyelenggara Pemilu (1 kasus) Lainnya 6. Keterlibatan Gubernur dan 32 Kepala Daerah di Jawa Tengah (1 kasus) 7. Netralitas ASN (9 kasus) 8. Ketralitas Kades (1 kasus) Kasus Tidak Diregister 9. Ujaran kebencian (Tidak diregister)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															10. Penipuan (Tidak diregister) 11. Kegandaan C1 pada SITUNG (Tidak diregister) 12. Pengurangan Suara (2 Tidak diregister)
2	Kab. Banjarnegara	11	4	1	-	6	-	-	1+ 3#	1	-	-	5	1	Pidana 1. Pelibatan pihak yang dilarang (1 kasus) 2. <i>Money Politic</i> (2 kasus) 3. Tindakan Menguntungkan (1 kasus) Administrasi 4. Penyelenggara Pemilu terlibat dalam kampanye (1 kasus) Lainnya 5. Keterlibatan Kades (1 kasus) 6. Keterlibatan Perangkat Desa (2 kasus) 7. Keterlibatan Anggota BPD (2 kasus) 8. Keterlibatan ASN (1 kasus) Tidak Diregister

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															9. Keterlibatan ASN (1 Tidak diregister)
3	Kab. Banyumas	59	21	35	-	3	-	-	21#	26	9	-	2	1	Pidana 1. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) 2. Kampanye di tempat pendidikan (5 kasus) 3. Kampanye di tempat ibadah (1 kasus) 4. <i>Money politic</i> (13 kasus) 5. Pemberian Materi Lain (1 kasus) Administrasi 6. Proses DPT (18 kasus) 7. <i>APK illegal</i> (1 kasus) 8. STTP (11 kasus) 9. Penyelenggara Pemilu terlibat dalam kampanye (2 kasus) 10. Kesalahan penetapan Tim Kampanye (1 kasus) 11. Kesalahan Penghitungan Suara (1 kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															12. Pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur (1 kasus) Lainnya 13. Keterlibatan PKH (3 kasus)
4	Kab. Batang	9	7	2	-	-	-	-	7#	2	-	-	-	-	Pidana 1. <i>Money Politic</i> (3 kasus) 2. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) 3. Kampanye di tempat ibadah (1 kasus) 4. Kades tindakan menguntungkan (1 kasus) 5. Pelibatan pihak yang dilarang (1 kasus) Administrasi 6. Verifikasi Anggota Parpol tidak sesuai prosedur (1 kasus) 7. Mobil Branding (1 kasus)
5	Kab. Blora	7	2	1	-	4	-	-	2#	-	1	-	3	1	Pidana 1. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) 2. <i>Money Politic</i> (1 kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															Administrasi 3. Kampanye di luar jadwal (Adm) (1 kasus) Lainnya 4. Keterlibatan ASN (1 kasus) 5. Keterlibatan Kades (1 kasus) 6. Keterlibatan PKH (1 Kasus) 7. Keterlibatan P3MD (1 kasus)
6	Kab. Boyolali	14	2	7	-	5	-	-	1^ 1#	6	1	-	4	1	Pidana 1. <i>Money politic</i> (1 kasus) 2. Tindakan menguntungkan salah satu peserta pemilu (1 kasus) Administrasi 3. Penyelenggara Pemilu terlibat dalam kampanye (1 kasus) 4. <i>APK illegal</i> (1 kasus) 5. Pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT (1 kasus) 6. Pemilih tidak mengisi C3 (1 kasus) 7. Perbedaan C1 dan DA1 (1 kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															8. Kesalahan DA.1 (1 kasus) 9. Saksi tidak sesuai dengan surat mandat (1 kasus) Lainnya 10. Keterlibatan ASN (2 kasus) 11. Keterlibatan Kades (1 kasus) 12. Keterlibatan Perangkat Desa (2 kasus)
7	Kab. Brebes	64	11	47	2	4	-	-	11#	45	2	1* 1\$	3	1	Pidana 1. <i>Money politic</i> (3 kasus) 2. Pelibatan pihak yang dilarang (1 kasus) 3. Tindakan menguntungkan (2 kasus) 4. Kampanye di tempat pendidikan (2 kasus) 5. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) 6. Penggunaan Fasilitas Pemerintah (1 kasus) 7. Intervensi hak pilih seseorang (1 kasus) Administrasi 8. <i>APK illegal</i> (41 kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															9. STTP (1 kasus) 10. Pemilih tidak terdaftar di DPT (1 kasus) 11. Penyerahan berkas pencalonan tidak sesuai syarat (1 kasus) 12. Kesalahan Data DA.1 (2 kasus) 13. Kesalahan pada DPK (1 kasus) Kode Etik 14. Netralitas Penyelenggara Pemilu (1 kasus) 15. Penyelenggara pemilu tidak profesional (1 kasus) Lainnya 16. Keterlibatan ASN (3 kasus) 17. Keterlibatan Kades (1 kasus)
8	Kab. Cilacap	2	2	-	-	-	-	-	1* 1#	-	-	-	-	-	Pidana 1. <i>Money Politic</i> (2 kasus) Tidak Diregister 2. Penggunaan Fasilitas Pemerintah (1 Tidak diregister)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

9	Kab. Demak	11	5	5	-	1	-	-	4# 1*	5	-	-	1	-	Pidana 1. Pelibatan pihak yang dilarang (2 kasus) 2. Kampanye di tempat pendidikan (1 kasus) 3. Perusakan APK (2 kasus) Administrasi 4. Penggunaan fasilitas negara (1 kasus) 5. Ketidakprofesionalan KPPS (1 kasus) 6. Jumlah Surat Suara Tidak Sesuai dengan C1 (2 kasus) 7. Kampanye di tempat ibadah (ADM) (1 kasus) Lainnya 8. Keterlibatan Perangkat Desa (1 kasus)
10	Kab. Grobogan	4	3	1	-	-	-	-	3#	-	1	-	-	-	Pidana 1. <i>Money politic</i> (2 kasus) 2. Tindakan menguntungkan salah satu paslon (1 kasus) Administrasi

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															3. Caleg DPRD yang tidak sesuai persyaratan (1 kasus)
11	Kab. Jepara	8	3	4	-	1		-	2# 1&	3	1	-	1	-	Pidana 1. Penggunaan Fasilitas Pemerintah (2 kasus) 2. Penghinaan terhadap Capres (1 kasus) Administrasi 3. STTP (2 kasus) 4. KPPS tidak berhak menandatangani surat suara (1 kasus) 5. Pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT (1 kasus) Lainnya 6. Keterlibatan ASN (1 kasus) Tidak Diregister 7. Perusakan APK (2 Tidak diregister)
12	Kab. Karanganyar	14	3	11	-	-	-	-	2# 1*	11	-	-	-	-	Pidana 1. Tindakan menguntungkan dari salah satu peserta pemilu (1 kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															2. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) 3. Penggunaan Fasilitas Pemerintah (1 kasus) Administrasi 4. <i>APK illegal</i> (11 kasus) Tidak Diregister 5. Penyalahgunaan Data Penduduk (1 Tidak diregister)
13	Kab. Kebumen	6	5	1	-	-	-	-	4# 1&	1	-	-	-	-	Pidana 1. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) 2. Tindakan menguntungkan (1 kasus) 3. Kampanye di tempat pendidikan (1 kasus) 4. Penggunaan fasilitas pemerintah (1 kasus) 5. <i>Money Poitic</i> (1 kasus) Administrasi 6. Ketidakprofesionalan Panwascam (1 kasus)
14	Kab. Kendal	6	4	1	-	1	-	-	1*	1	-	-	1	-	Pidana



Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : bawaslu-jatengprov.go.id
E-mail : bawaslujateng@yahoo.com

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

									3#							- Kampanye di luarjadwal (1 kasus) - Penggunaan Fasilitas Pemerintah (1 kasus) - Kampanye di tempat ibadah (1 kasus) - Kampanye di tempat pendidikan (1 kasus) Administrasi - Pemberian A5 tidak sesuai prosedur (1 kasus) Lainnya - Netralitas Perangkat Desa (1 kasus) Tidak Diregister - Perusakan APK (2 Tidak diregister) - Kampanye Tanpa STTP (1 Tidak diregister) - APK di rumah KPPS (1 Tidak diregister) - Pencemaran nama baik (1 kasus)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	---

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															11. Pemberian surat suara kepada yang tidak semestinya (1 kasus)
15	Kab. Klaten	13	2	5	-	6	-	-	2#	2	3	-	6	-	Pidana 1. Penggunaan Fasilitas Pemerintah (1 kasus) 2. <i>Money Politic</i> (1 kasus) Administrasi 3. STTP (2 kasus) 4. <i>APK Illegal</i> (1 kasus) 5. Kampanye di <i>white area</i> (1 kasus) 6. Kesalahan Data DA.1 (1 kasus) Lainnya 7. Keterlibatan ASN (3 kasus) 8. Keterlibatan Kades (3 kasus)
16	Kab. Kudus	47	5	41	-	1	-	-	5#	41	-	-	1	-	Pidana 1. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) 2. Penggunaan fasilitas pemerintah (2 kasus) 3. Pelibatan pihak yang dilarang (1 kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															4. <i>Money Politic</i> (1 kasus) Administrasi 5. Kampanye di <i>white area</i> (1 kasus) 6. APK dan Bahan Kampanye <i>illegal</i> (40 kasus) Lainnya 7. Keterlibatan Kades (1 kasus)
17	Kab. Magelang	15	10	-	-	5	-	-	6# 4*	-	-	-	5	-	Pidana 1. Penggunaan fasilitas pemerintah (1 kasus) 2. Ketidakabsahan dokumen pencalonan (1 kasus) 3. <i>Money politic</i> (5 kasus) 4. Pelibatan pihak yang dilarang (1 kasus) 5. Kampanye Negatif (2 kasus) Lainnya 6. Keterlibatan Kades (1 kasus) 7. Netralitas ASN (1 kasus) 8. Keterlibatan Perangkat Desa (3 kasus)
18	Kab. Pati	3	2	-	-	1	-	-	2#	-	-	-	1	-	Pidana 1. Perusakan APK (1kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															2. <i>Money Politic</i> (1 kasus) Lainnya 3. Keterlibatan Perangkat Desa (1kasus) Tidak Diregister 4. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) 5. Perusakan APK (4 kasus) 6. <i>APK Illegal</i> (1 kasus) 7. Keterlibatan Perangkat Desa (2 kasus) 8. Keterlibatan Kepala Desa (2 kasus) 9. Keterlibatan anggota BPD (3kasus)
19	Kab. Pekalongan	11	6	3	-	2	-	-	4* 1# 1&	3	-	-	2	-	Pidana 1. Tindakan menguntungkan oleh Kades (2 kasus) 2. Penggunaan fasilitas pemerintah (1 kasus) 3. <i>Money politic</i> (2kasus) 4. Pelibatan pihak yang dilarang (1 kasus) Adiministrasi

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															5. Kesalahan pada DPT (1 kasus) 6. Penyelenggara Pemiluterlibat dalam kampanye (1 kasus) 7. Pemilih tidak mendapatkan surat suara lengkap (1 kasus) Lainnya 8. Keterlibatan Kades (2 kasus) Tidak Diregister 9. Keterlibatan ASN (3 tidak diregister) 10. Money Politic (2 tidak diregister)
20	Kab. Pemalang	4	3	-	-	1	-	-	2# 1^	-	-	-	1	-	Pidana 1. Tindakan menguntungkan (1 kasus) 2. Penggunaan fasilitas pemerintah (1 kasus) 3. Pelibatan pihak yang dilarang (1kasus) Lainnya 4. Keterlibatan ASN (1 kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

21	Kab. Purbalingga	18	4	9	-	5	-	-	4#	9	-	-	3	2	Pidana 1. Tindakan menguntungkan (1 kasus) 2. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) 3. Pelibatan pihak yang dilarang (1 kasus) 4. <i>Money politic</i> (1 kasus) Administrasi 5. <i>APK illegal</i> (4 kasus) 6. STTP (5 kasus) Lainnya 7. Keterlibatan ASN (2kasus) 8. Keterlibatan Perangkat Desa (2 kasus) 9. Keterlibatan BDP (1 kasus) Tidak Diregister 10. Netralitas ASN (1 Kasus)
22	Kab. Purworejo	13	6	4	-	3	-	-	4# 2^	4	-	-	3	-	Pidana 1. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) 2. Penggunaan fasilitas pemerintah (1kasus) 3. <i>Money Politic</i> (2kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															4. Pelibatan pihak yang dilarang (2 kasus) Administrasi 5. Proses DPT (1 kasus) 6. STTP (1 kasus) 7. Penggunaan fasilitas negara (1 kasus) 8. Penyelenggara Pemilu terlibat dalam kampanye (1 kasus) Lainnya 9. Keterlibatan ASN (1 kasus) 10. Keterlibatan PKH dan PLD (2 kasus)
23	Kab. Rembang	5	1	2	1	1	-	-	1#	-	2	1&	1	-	Pidana 1. Penurunan/Perusakan APK (1 kasus) Administrasi 2. Bahan Kampanye Illegal (1 kasus) 3. Kampanye tanpa STTP (1 kasus) Kode etik

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															4. Netralitas Penyelenggara Pemilu (1 kasus) Lainnya 5. Netralitas Perangkat Desa (1 kasus) Tidak Diregister 6. Pemilih dari luar wilayah masuk dalam DPT (1 tidak diregister)
24	Kab. Semarang	5	2	3	-	-	-	-	1+ 1#	3	-	-	-	-	Pidana 1. <i>Money Politic</i> (1 kasus) 2. Kades tindakan menguntungkan (1 kasus) Administrasi 3. Sambutan KPPS berisi pengenalan Caleg (1 kasus) 4. Penyelenggara Pemilu terlibat dalam kegiatan Parpol (1 kasus) 5. Kampanye tanpa STTP (1 kasus) Tidak Diregister

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															6. Perusakan APK (1 tidak diregister) 7. Kampanye di tempat ibadah (1 tidak diregister) 8. Netralitas ASN (1 tidak diregister) 9. <i>Money Politic</i> (1 tidak diregister)
25	Kab. Sragen	7	3	-	-	4	-	-	3#	-	-	-	3	1	Pidana 1. Tindakan menguntungkan (2 kasus) 2. Penggunaan fasilitas pemerintah (1 kasus) Lainnya 3. Keterlibatan ASN (3 kasus) 4. Keterlibatan Kepala Daerah (1 kasus)
26	Kab. Sukoharjo	19	4	10	-	5	-	-	1^ 1# 1* 1&	10	-	-	5	-	Pidana 1. <i>Money Politic</i> (3 kasus) 2. Kampanye Negatif (1 kasus) Administrasi 3. STTP (2 kasus) 4. Penggunaan fasilitas negara (2 kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															5. Proses pembentukan penyelenggara pemilu tidak sesuai prosedur (1 kasus) 6. Kesalahan rekap DA.1 dan DAA.1 (1 kasus) 7. Pelibatan pihak yang dilarang (ADM) (1 kasus) 8. Kampanye terbuka tidak sesuai prosedur (1 kasus) 9. Kampanye di tempat ibadah (ADM) (1 kasus) 10. Ketidaknetralan Kepala Daerah (1 kasus) Lainnya 11. Keterlibatan ASN (1 kasus) 12. Keterlibatan perangkat desa (2 kasus) 13. Keterlibatan Kades (1 kasus) 14. Keterlibatan Kadus (1 kasus)
27	Kab. Tegal	38	7	31	-	-	-	-	3* 3# 1^	31	-	-	-	-	Pidana 1. <i>Money politic</i> (2 kasus) 2. Tindakan menguntungkan (2 kasus) 3. Perusakan APK (1kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															4. Penggunaan Hak Pilih Lebih dari 1 kali (1 kasus) 5. Pemalsuan Dokumen (1 kasus) Administrasi 6. Proses DPT (2 kasus) 7. <i>APK illegal</i> (28 kasus) 8. Pendaftaran calon tidak sesuai prosedur (1 kasus) Tidak Diregister 9. Netralitas Kades (1 Tidak Diregister) 10. Netralitas Penyelenggara Pemilu (2 kasus)
28	Kab. Temanggung	2	2	-	-	-	-	-	2#	-	-	-	-	-	Pidana 1. <i>Money Politic</i> (1 kasus) 2. Perusakan APK (1 kasus)
29	Kab. Wonogiri	32	10	20	-	2	-	-	9# 1^	19	1	-	1	1	Pidana 1. <i>Money Politic</i> (7 kasus) 2. Anggota BPD melakukan tindakan menguntungkan (1 kasus) 3. Kampanye di luar jadwal (2 kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															Administrasi 4. APK <i>illegal</i> (15 kasus) 5. Penggunaan fasilitas negara (1 kasus) 6. Proses pembentukan penyelenggara pemilu (1 kasus) 7. Ketidakprofesionalan KPUD (1 kasus) 8. Penyelenggara Pemilu terlibat dalam keanggotaan parpol (2 kasus) Lainnya 9. Keterlibatan Kades (1 kasus) 10. Keterlibatan ASN (1 kasus) Tidak Diregister 11. Penggunaan fasilitas negara (1 Tidak Diregister)
30	Kab. Wonosobo	10	7	3	-	-	-	-	6# 1^	3	-	-	-	-	Pidana 1. Penggunaan fasilitas pemerintah (3 kasus) 2. Tindakan menguntungkan (2 kasus) 3. <i>Money Politic</i> (1 kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															4. Kampanye di tempat pendidikan (1 kasus) Administrasi 5. Kampanye tanpa STTP (1 kasus) 6. Pembuatan A.5 Manual (1 kasus) 7. PPS mengunggah konten kampanye (1 kasus)
31	Kota Magelang	9	2	7	-	-	-	-	2#	7	-	-	-	-	Pidana 1. Penggunaan tempat ibadah (1 kasus) 2. Penggunaan fasilitas pemerintah (1 kasus) Administrasi 3. Proses pembentukan penyelenggara pemilu (1 kasus) 4. STTP (4 kasus) 5. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT (1 kasus) 6. Tidak Terisinya Form C2 (1 kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

32	Kota Pekalongan	76	4	70	-	2	-	-	1% 2# 1^	70	-	-	2	-	Pidana 1. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) 2. Money Politic (2 kasus) 3. Penggunaan Fasilitas Pemerintah (1 kasus) 4. Administrasi 5. APK <i>illegal</i> (67 kasus) 6. STTP (2 kasus) 7. Penyelenggara Pemilu terlibat kampanye (1 kasus) Lainnya 8. Keterlibatan ASN (2 kasus) Tidak Diregister 9. Tindakan Penyerangan (1 tidak diregister) 10. <i>Money Politic</i> (2 tidak diregister)
33	Kota Salatiga	7	3	3	-	1	-	-	3#	3	-	-	1	-	Pidana 1. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) 2. <i>Money Politic</i> (1 kasus) 3. Kampanye di tempat ibadah (1 kasus)

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

															Administrasi 4. Penggunaan fasilitas negara (2 kasus) 5. Proses DPT (1 kasus) Lainnya 6. Keterlibatan ASN (1 kasus) Tidak Diregister 7. Ujaran Kebencian (1 kasus) 8. Perusakan APK (1 kasus)
34	Kota Semarang	42	10	29	-	3	-	-	1* 9#	29	-	-	3	-	Pidana 1. <i>Money politic</i> (4 kasus) 2. Penggunaan fasilitas pemerintah (2 kasus) 3. Kampanye di tempat ibadah (1 kasus) 4. Perusakan APK (1 kasus) 5. Pelibatan pihak yang dilarang (1 kasus) 6. Penggelembungan Suara (1 kasus) Administrasi 7. STTP (15 kasus) 8. <i>Money Politic</i> (ADM) (2 Kasus)



Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : bawaslu-jatengprov.go.id
E-mail : bawaslujateng@yahoo.com

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

[illegible]

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

35	Kota Surakarta	5	4	1	-	-	-	-	3# 1%	1	-	-	-	-	Pidana 1. Kampanye di tempat pendidikan (1 kasus) 2. Penggunaan fasilitas pemerintah (1 kasus) 3. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) 4. Money Politic (1 kasus) Administrasi 5. Kesalahan input DAA.1 (1 kasus) Tidak Diregister 6. <i>Money Politic</i> (1 kasus) 7. Kampanye Negatif (1 kasus) 8. Kampanye di tempat pendidikan (1 kasus)
36	Kota Tegal	9	5	1	-	3	-	-	2# 3*	1	-	-	-	3	Pidana 1. <i>Money Politic</i> (1kasus) 2. Penggunaan fasilitas pemerintah (3 kasus) 3. Kampanye di luar jadwal (1 kasus) Administrasi

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

																4. Penyelenggara Pemilu mengunggah konten Kampanye (1 kasus) Lainnya 5. Keterlibatan ASN (3 kasus)
TOTAL	622	175	360	6	81	-	-	175	339	21	6	68	13			

Keterangan Kasus Dugaan Pidana :

& = Berhenti di Bawaslu : 6 Kasus Pidana

*** = Berhenti di Pembahasan I : 18 Kasus Pidana**

= Berhenti di Pembahasan II : 138 Kasus Pidana

% = Berhenti di Pembahasan III : 2 Kasus Pidana

@ = Berhenti di Pembahasan IV : 0 Kasus Pidana

(= Masih Proses Penyidikan : 0 Kasus Pidana

Keterangan Kasus Pidana

DATA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2019

+ = Putusan Tidak Terbukti di Pengadilan : 2 Kasus Pidana

^= Putusan Terbukti : 9 Kasus Pidana

/ = Proses di Pengadilan : 0 Kasus Pidana

Keterangan Kasus Kode Etik

& = Berhenti di Bawaslu : 4 Kasus Kode Etik

*** = Sudah Proses di DKPP : 1 Kasus Kode Etik**

\$ = Belum Proses di DKPP : 1 Kasus Kode Etik